



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENANGANAN BENCANA BANJIR**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penanganan dampak genangan atau banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan penanganan dampak genangan atau banjir dengan masing-masing tugas, sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta :

1. membuat Posko Crisis Center Penanggulangan Banjir tingkat Provinsi
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penanganan banjir Tingkat Provinsi
3. Mengoordinasikan kegiatan penanganan banjir pada tingkat Provinsi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai tupoksi masing-masing.
4. berkoordinasi dengan para Walikota/Bupati dalam penanganan banjir tingkat Kota/Kabupaten
5. Berkoordinasi dengan BNPB terkait penanganan banjir

b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :

1. membentuk Pos Komando (Posko) Siaga Bencana di kantor masing-masing.

2. Posko Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk dengan struktur kelembagaan, sebagai berikut :
  - a) Ketua : Walikota/Bupati  
Wakil Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
  - b) Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
  - c) Sekretariat : Bagian Pemerintahan Setko Administrasi/Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Administrasi
  - d) Anggota : Dandim, Kapolres, Perangkat Kota/Kabupaten Administrasi , Organisasi Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota/Kabupaten
3. menyusun jadwal piket Posko Siaga Bencana;
4. Posko Siaga Bencana harus menyediakan data-data, sebagai berikut :
  - a) Peta Wilayah;
  - b) Peta Rawan Banjir;
  - c) Peta Data Kependudukan;
  - d) Peta Lokasi Pengungsian;
  - e) Data dan kepemilikan sarana dan prasarana (perahu penyelamatan/rakit/ban, alat dapur umum, lampu emergensi, senter, radio komunikasi, tandu, tali, P3K, megaphone, genset); dan
  - f) Petugas piket.
5. berkoordinasi dengan UKPD tingkat kota/kabupaten administrasi sesuai dengan tupoksinya terkait dengan penanganan banjir
6. melaporkan kepada Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta tentang kebutuhan penanganan banjir yang tidak dapat dipenuhi oleh UKPD pada poin 5 .
- c. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas posko tingkat Kota, Kecamatan Dan Kelurahan.
- d. Para Camat Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk :
  1. membentuk Pos Komando (Posko) Siaga Bencana di halaman kantor masing-masing.
  2. Posko Siaga Bencana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk dengan struktur organisasi, sebagai berikut:
    - a) Ketua : Camat
    - b) Wakil Ketua : Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan
    - c) Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
    - d) Anggota : Danramil, Kapolsek, Perangkat Kecamatan, Organisasi Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3. menyusun jadwal piket Posko Siaga Bencana;
  4. Posko Siaga Bencana harus menyediakan data-data, sebagai berikut :
    - a) Peta Wilayah;
    - b) Peta Rawan Banjir;
    - c) Peta Data Kependudukan;
    - d) Peta Lokasi Pengungsian;
    - e) Data dan kepemilikan sarana dan prasarana (perahu penyelamatan/rakit/ban, alat dapur umum, lampu emergensi, senter, radio komunikasi, tandu, tali, P3K, megaphone, genset); dan
    - f) Petugas piket.
  5. melaporkan kepada Walikota/Bupati tentang kebutuhan penanganan banjir yang tidak dapat dipenuhi oleh Kecamatan.
- e. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk :
1. membentuk Pos Komando (Posko) Siaga Bencana di halaman kantor masing-masing.
  2. Posko Siaga Bencana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk dengan struktur organisasi, sebagai berikut :
    - a) Ketua : Lurah
    - b) Wakil Ketua : Sekretaris Kelurahan
    - c) Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan
    - d) Anggota : Babinsa, Bhabinkamtibmas, Perangkat Kelurahan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
  3. Para Lurah menyusun jadwal piket Posko Siaga Bencana;
  4. Posko Siaga Bencana harus menyediakan data-data, sebagai berikut:
    - a) Peta Wilayah;
    - b) Peta Rawan Banjir;
    - c) Peta Data Kependudukan;
    - d) Peta Lokasi Pengungsian;
    - e) Data dan kepemilikan sarana dan prasarana (perahu penyelamatan/rakit/ban, alat dapur umum, lampu emergensi, senter, radio komunikasi, tandu, tali, P3K, megaphone, genset); dan
    - f) Petugas piket.
  5. melaporkan kepada Camat tentang kebutuhan penanganan banjir yang tidak dapat dipenuhi oleh Kelurahan.

KEDUA : Kepala Pelaksana BPBD, Para Walikota, Bupati, Para Camat dan Para Lurah berpedoman pada mekanisme penanganan siaga bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD).
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan bencana banjir kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Jakarta,



Anies Baswedan, Ph. D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

**MEKANISME PENANGANAN SIAGA BENCANA**

**A. Mekanisme Penanganan Siaga Bencana yang mengalami banjir lokal**

No	Situasi	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kabupaten	Provinsi	Keterangan
1	Normal	1. Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kelurahan 2. PPSU melakukan pengecekan tali-tali air dan dituangkan dalam bentuk daftar check list 3. Pengecekan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir 5. Sosialisasi Penanganan Banjir 6. Menyampaikan informasi cuaca resmi kepada warga	1. Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kecamatan 2. Melakukan pengecekan kesiapan Lurah 3. Mengecek kesiapan Satpel SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskes/Dishub/DLH/Bina Marga/Ka Sektor Damkar/Keputusan/Satpel Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil 4. Melapor ke tingkat Kota/Kabupaten (Walikota/Bupati c.q sekkosekkab)	1. Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kota/Kabupaten 2. Melakukan pengecekan kesiapan wilayah 3. Berkomunikasi dan Mengecek kesiapan Suku Dinas SDA/Sudinsos/Satpol PP/Sudin Kesehatan/Sudinhub/Sudin LH/Sudin Bina Marga/Sudin Damkar/Sudin Keputanan/Sudin Pendidikan/Sudin Dispora/Polres dan Kodim 4. Memerintahkan para Asisten dan Irbanko mengecek kesiapan posko Kota/Kabupaten 5. Sekko/Sekkab melaporkan kesiapan tingkat Kota/Kabupaten kepada Kepala Pelaksana BPBD	1. Membentuk Posko crisis center penanggulangan banjir di tingkat Provinsi 2. Menginformasikan Perkembangan Perkiraan Cuaca Kepada Walikota/Bupati 3. Kalak BPBD Berkomunikasi dan Mengecek kesiapan Dinas SDA/Dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dinhub/Dinas LH/Dinas Bina Marga/Dinas Damkar/Dinas Keputanan/Dinas Pendidikan/ Dispora 4. Koordinasi dengan TNI dan Polri untuk kesiapan penanggulangan bencana	
2	Awas	1. Menyampaikan peringatan dini potensi terjadinya bencana kepada RT/RW dan Masyarakat melalui grup WA/pengeras suara masjid/sirne 2. Komunikasi dengan camat 3. Menggerakkan PPSU untuk cek kondisi lapangan 4. Memobilisasi persormil dan peralatan posko kebencanaan 5. Berkoordinasi dengan penanggung jawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air	1. Melaporkan kepada Walikota/Bupati tentang kondisi wilayah 2. Memobilisasi Satpel SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskes/Dishub/DLH/Bina marga/Ka Sektor Damkar/Keputanan/Satpel Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil 3. Berkoordinasi dengan penanggung jawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air	1. Memantau kondisi wilayah 2. Memobilisasi Suku Dinas SDA/Sudinsos/Satpol PP/Sudin Kesehatan/Sudinhub/Sudin LH/Sudin Bina Marga/Sudin Damkar/Sudin Keputanan/Sudin Pendidikan/Sudin Dispora/Polres dan Kodim 3. melaporkan hasil koordinasi Kepada BPBD	1. Kalak BPBD Memobilisasi dinas SDA/Dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dinhub/Dinas LH/Dinas Bina Marga/Dinas Damkar/Dinas Keputanan/Dinas Pendidikan/ Dispora 2. Kepala Pelaksana BPBD melaporkan situasi kepada Sekda selaku Kepala BPBD (WAKomunikasi)	Posisi hujan deras diperkirakan berpotensi banjir
3	Tergenang	1. Menghimbau RT/RW melakukan evakuasi mandiri 2. Menghubungi PLN/112 3. Memerintahkan persormil Kelurahan untuk melakukan pendampingan evakuasi ke titik lokasi yang telah ditetapkan	1. Memerintahkan satpel SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskesmas/Dishub/DLH/Bina Marga/Ka Sektor Damkar/Keputanan/Satpel Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil, mendampingi pelaksanaan evakuasi di kelurahan 2. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada Walikota/Bupati c.q Sekko/Sekkab	1. Posko penanganan bencana tingkat kota menerima permintaan evakuasi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui instansi TNI/POLRI, kementerian lembaga serta komunitas penggiat penanggulangan bencana 2. BPBD mengkolaborasi dengan OPD terkait dan lembaga penggiat penanggulangan bencana terhadap pemenuhan kebutuhan yang dimaksud		



			4. Melaporkan kepada Camat perlunya dukungan dari SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskas/Dishub/DLH/Bina Marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpol Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil 5. Pada saat dapur umum KSB belum siap, menggunakan anggaran kelurahan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dalam 1x24 jam 6. Inventarisasi jumlah pengungsi dan kebutuhannya 7. Memonitor pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi (air bersih dan obat-obatan) 8. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada camat					memenuhi kebutuhan warga terdampak berpotensi menjadi kendala di lapangan
	4 Rehabilitasi	Membuat Laporan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)	1. Mengoordinasikan para Lurah untuk melakukan upaya pelaksanaan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)			1. Mengoordinasikan para Walikota/Bupati untuk melakukan upaya pelaksanaan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)		
	a. Air/Listrik	1. Berkoordinasi dengan PLN/PPDAM setempat	2. Merekapitulasi Laporan Rehabilitasi dari tingkat Kelurahan (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)			2. Merekapitulasi Laporan Rehabilitasi dan tingkat Kota/Kabupaten (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)		
		2. Lurah melakukan pengecekan dilapangan memastikan listrik dan air telah berfungsi	3. mengoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat kecamatan untuk pemesejaan rehabilitasi yang belum dapat dituntaskan oleh Lurah			3. mengoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi untuk permasalahan rehabilitasi yang belum dapat dituntaskan oleh Walikota/Bupati		
	b. Jalan Berfungsi	1. Menetapkan jadwal kerja bakti di lokasi terdampak	4. melaporkan rekapitulasi laporan dan permasalahan Rehabilitasi yang belum bisa diselesaikan di tingkat kecamatan kepada Walikota/Bupati			4. melaporkan rekapitulasi laporan dan permasalahan Rehabilitasi yang belum bisa diselesaikan di tingkat Provinsi kepada Sekda selaku Kepala BPBD		
		2. Melaksanakan kerja bakti di lokasi terdampak				5. Kepala BPBD melaporkan rekapitulasi laporan dan permasalahan Rehabilitasi yang belum bisa diselesaikan di tingkat Provinsi kepada Kepala BNPB		
	c. Rumah bersih	1. Distibusi desinfectan ke rumah warga terdampak						
		2. Mengoordinasikan pendampingan pelaksanaan bersih-bersih rumah						
	d. Pengungsian	Berkoordinasi dengan para RT/RW untuk memastikan tidak terdapat lagi pengungsi di lokasi pengungsian						
	e. Pemulihan dokumen administrasi kependudukan	1. memberikan prioritas pelayanan pemulihan dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak 2. Melaksanakan pelayanan penyelesaian pemulihan dokumen administrasi kependudukan satu hari kerja selesai						

B. Mekanisme Penanganan Siaga Bencana yang disebabkan banjir kiriman dan rob

No	Situasi	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kabupaten	Provinsi	Keterangan
1	Normal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kelurahan</li> <li>PPSU melakukan pengecekan tali-tali air dan dituangkan dalam bentuk daftar check list</li> <li>Pengecekan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir</li> <li>Sosialisasi Penanganan Banjir</li> <li>Menyampaikan informasi cuaca resmi kepada warga</li> <li>melakukan pendataan RT/RW yang berpotensi mengalami banjir kiriman dan rob dari melaporkan ke Camat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kecamatan</li> <li>Melakukan pengecekan kesiapan Lurah</li> <li>Mengecek kesiapan Satpel SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskes/Dishub/DLH/Bina marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpel Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil</li> <li>Melapor ke tingkat Kota (Walikota/Kabupaten c.q Sekko/Sekkab)</li> <li>merekap data Kelurahan yang berpotensi mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan ke Walikota/Bupati</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Posko Siaga Bencana di tingkat Kota/Kabupaten</li> <li>Melakukan pengecekan kesiapan wilayah</li> <li>Berkomunikasi dan Mengecek kesiapan Suku Dinas SDA/Sudinsos/Satpol PP/Sudin Kesehatan/Sudintub/Sudin LH/Sudin Bina Marga/Sudin Damkar/Sudin Kehutanan/Sudin Pendidikan/Sudin Dispora/Polres dan Kodim</li> <li>Memerintahkan para Asisten dan Irbanko mengecek kesiapan posko kota</li> <li>Sekko melaporkan kesiapan tingkat kota kepada kepala pelaksana BPBD</li> <li>merekap data Kecamatan yang berpotensi mengalami banjir kiriman dan rob dari melaporkan ke Kepala Pelaksana BPBD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk posko crisis center penanggulangan banjir di tingkat Provinsi</li> <li>Menginformasikan Perkembangan Perkiraan Cuaca Kepada Walikota/Bupati</li> <li>Kalak BPBD Berkomunikasi dan Mengecek kesiapan dinas SDA/Dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dinlub/Dinas LH/Dinas Bina Marga/Dinas Damkar/Dinas Kehutanan/Dinas Pendidikan/ Dispora</li> <li>Koordinasi dengan TNI dan Polri untuk kesiapan penanggulangan bencana</li> <li>merekap data Kota/Kabupaten yang berpotensi mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan kepada Sekda selaku Kepala BPBD</li> </ol>	
2	Awas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan peringatan dini potensi terjadinya bencana kepada RT/RW dan Masyarakat melalui grup WA/pengeras suara masjid/sirine</li> <li>Komunikasi dengan Camat</li> <li>Mengerakkan PPSU untuk cek kondisi lapangan</li> <li>Memobilisasi personil dan peralatan posko kebencanaan</li> <li>Berkoordinasi dengan penanggung jawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan kepada Walikota tentang kondisi wilayah</li> <li>Memobilisasi satpel SDA/dinsos/Satpol PP/Puskes/Dishub/DLH/Bina marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpel Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil</li> <li>Berkoordinasi dengan penanggung jawab titik lokasi pengungsian/pos kesehatan/dapur umum/petugas pompa dan pintu air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kalak BPBD Memobilisasi dinas SDA/dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dinlub/Dinas LH/Dinas Bina Marga/Dinas Damkar/Dinas Kehutanan/Dinas Pendidikan/ Dispora</li> <li>Kepala pelaksana BPBD melaporkan situasi kepada sekda selaku kepala BPBD (WA/komunikasi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kalak BPBD Memobilisasi dinas SDA/dinsos/Satpol PP/Dinas Kesehatan/Dinlub/Dinas LH/Dinas Bina Marga/Dinas Damkar/Dinas Kehutanan/Dinas Pendidikan/ Dispora</li> <li>Kepala pelaksana BPBD melaporkan situasi kepada sekda selaku kepala BPBD (WA/komunikasi)</li> </ol>	Posisi hujan deras diperkirakan berpotensi banjir
3	Tergenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghimbau RT/RW melakukan evakuasi mandiri</li> <li>Menghubungi PLN/112</li> <li>Memerintahkan personil Kelurahan untuk melakukan pendampingan evakuasi ke titik lokasi yang telah ditetapkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memerintahkan Satpel SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskesmas/Dishub/DLH/Bina marga/Ka Sektor Damkar/Kehutanan/Satpel Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil mendampingi pelaksanaan evakuasi di kelurahan</li> <li>Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada Walikota/Bupati c.q Sekko/Sekkab</li> <li>merekap data Kelurahan yang mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan ke Walikota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posko penanganan bencana tingkat provinsi menerima permintaan evakuasi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui instansi TNI/POLRI, kementerian , lembaga serta komunitas penggiat penanggulangan bencana</li> <li>BPBD mengkolaborasi dengan OPD terkait dan lembaga penggiat penanggulangan bencana terhadap pemenuhan kebutuhan yang dimaksud</li> <li>merekap data Kota yang mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan kepada Sekda selaku Kepala BPBD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posko penanganan bencana tingkat provinsi menerima permintaan evakuasi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya melalui instansi TNI/POLRI, kementerian , lembaga serta komunitas penggiat penanggulangan bencana</li> <li>BPBD mengkolaborasi dengan OPD terkait dan lembaga penggiat penanggulangan bencana terhadap pemenuhan kebutuhan yang dimaksud</li> <li>merekap data Kota yang mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan kepada Sekda selaku Kepala BPBD</li> </ol>	

		4. Melaporkan kepada camat perlunya dukungan dari SDA/Dinsos/Satpol PP/Puskes/Dishub/DLH/Bina Margai/Ka Sektor Damkar/Keputusan/Saipel Pendidikan/Dispora/Polsek dan Koramil		4. merekap data Kecamatan yang mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD	
		5. Pada saat dapur umum KSB belum siap, menggunakan anggaran kelurahan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dalam 1x24 jam			
		6. Inventarisasi jumlah pengungsi dan kebutuhannya			
		7. Memonitor pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi (air bersih dan obat-obatan)			
		8. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada camat			
		9. melakukan pendataan RT/RW yang mengalami banjir kiriman dan rob dan melaporkan ke Camat			
		Membuat Laporan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)		1. Mengoordinasikan para Camat untuk melakukan upaya pelaksanaan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)	1. Mengoordinasikan para Walikota untuk melakukan upaya pelaksanaan Rehabilitasi (Air/Listrik, Jalan Berfungsi, Rumah Bersih, Pengungsian, Pemulihan Dokumen Administrasi Kependudukan)
4	Rehabilitasi				
	a. Air/Listrik	1. Berkoordinasi dengan PLN/PDAM setempat			
		2. Lurah melakukan pengecekan dilapangan memastikan listrik dan air telah berfungsi			
	b. Jalan Berfungsi	1. Menetapkan jadwal kerja bakti di lokasi terdampak			
		2. Melaksanakan kerja bakti di lokasi terdampak			
	c. Rumah bersih	1. Distribusi desinfectan ke rumah warga terdampak			
		2. Mengoordinasikan pendampingan pelaksanaan bersih-bersih rumah			
	d. Pengungsian	Berkoordinasi dengan para RT/RW untuk memastikan tidak terdapat lagi pengungsi di lokasi pengungsian			
	e. Pemulihan dokumen administrasi kependudukan	1. memberikan prioritas pelayanan pemulihan dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak			
		2. Melaksanakan pelayanan penyelesaian pemulihan dokumen administrasi kependudukan satu hari kerja selesai			



Gubernur Daerah Khusus  
DKI Jakarta,  
Anwar Ibrahim, Ph. D